

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat, yang berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah, khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lemahnya koordinasi internal dan penyampaian kebijakan dari pimpinan kepada pelaksana di lapangan.

Menurut Rusmawaty (2021), lemahnya komunikasi dan koordinasi dalam organisasi pemerintah menjadi salah satu faktor utama tidak optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah, khususnya dalam hal penyampaian instruksi, sosialisasi kebijakan, serta pelaporan dari tingkat pelaksana kepada pimpinan. Komunikasi yang tidak berjalan efektif secara vertikal dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antara pengambil kebijakan dan petugas lapangan, sehingga pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di Provinsi Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe, persoalan sampah masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Kota Lhokseumawe sebagai wilayah dengan aktivitas perdagangan, industri, dan pemukiman yang terus

berkembang menghasilkan timbulan sampah yang cukup tinggi. Dalam konteks ini, peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe sangat strategis sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam merancang, mengoordinasikan, serta melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia, armada pengangkut, dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga oleh efektivitas komunikasi organisasi vertikal antara pimpinan, staf administrasi, dan petugas lapangan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi vertikal yang efektif berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Siregar (2021) menyatakan bahwa komunikasi yang jelas antara pimpinan instansi dan pelaksana lapangan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah, karena mampu memastikan kesesuaian antara kebijakan dan kondisi di lapangan. Selain itu, Ramli et al. (2022) menegaskan bahwa kesadaran organisasi terhadap isu lingkungan harus didukung oleh komunikasi vertikal yang terbuka, sehingga arahan pimpinan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota organisasi.

Di Kota Lhokseumawe sendiri masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan sampah, seperti penumpukan sampah di kawasan pasar tradisional, permukiman padat penduduk, serta sepanjang jalan utama kota seperti Jalan Samudera, Jalan Merdeka, dan sekitar Terminal Bus Kota. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe tahun 2024, volume sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai lebih dari 100 ton per hari, sementara kapasitas armada pengangkut dan sarana TPA belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pimpinan dengan pelaksanaan di lapangan, yang salah satunya dipengaruhi oleh belum optimalnya komunikasi vertikal dalam organisasi DLH.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek komunikasi organisasi, khususnya komunikasi vertikal antara pimpinan dan pelaksana. Hal ini sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1

Penumpukan Sampah Di Beberapa Titik Kota Lhokseumawe



Sumber : Observasi Peneliti, Selasa, 21 April 2026

Kondisi tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti bau tidak sedap, pencemaran air akibat lindi, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumbernya turut memperparah permasalahan di lapangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Bank Sampah dan kegiatan gotong royong rutin belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum efektifnya penyampaian kebijakan dan arahan dari

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada perangkat gampong dan petugas pelaksana di tingkat bawah.

Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi terkait jadwal pengangkutan sampah, lokasi tempat pembuangan sementara, serta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek komunikasi organisasi vertikal, khususnya dalam penyampaian instruksi, kebijakan, dan informasi dari pimpinan DLH kepada staf dan petugas lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Fajardinni et al. (2023) yang menyatakan bahwa komunikasi internal yang terbatas dalam instansi publik dapat menghambat keterbukaan informasi serta memperlemah koordinasi pelaksanaan pelayanan.

Kelemahan komunikasi vertikal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe berpotensi menimbulkan miskomunikasi, keterlambatan pelaksanaan tugas, serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pimpinan dengan kondisi di lapangan. Menurut Mulyana (2021), komunikasi vertikal yang efektif ditandai oleh kejelasan pesan, keterbukaan, serta adanya umpan balik dua arah antara atasan dan bawahan. Apabila komunikasi vertikal tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan publik berisiko tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang tidak terstruktur antara pimpinan dan petugas pelaksana menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah tidak tersampaikan secara utuh dan konsisten. Liliweri (2020) menegaskan bahwa lemahnya komunikasi organisasi secara vertikal dapat menurunkan koordinasi dan semangat kerja karena tidak

adanya kesamaan pemahaman antara atasan dan bawahan dalam menjalankan tugas. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendy (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada kelancaran arus informasi dari pimpinan kepada pelaksana, karena komunikasi yang terhambat dapat menimbulkan kesalahan persepsi dan menurunkan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada komunikasi organisasi vertikal, yang berperan penting dalam menyampaikan kebijakan, memperlancar arus informasi, serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai **“Komunikasi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Di Kota Lhokseumawe”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi organisasi vertikal Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah?
2. Apa saja hambatan komunikasi organisasi vertikal yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji komunikasi organisasi vertikal Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah.
2. Mengkaji hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi vertikal Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi organisasi vertikal Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat komunikasi organisasi vertikal Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam upaya pengelolaan sampah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi organisasi vertikal pada instansi pemerintah bidang lingkungan.
- b. Mengembangkan konsep komunikasi organisasi dengan menyoroti peran efektivitas komunikasi vertikal terhadap kinerja organisasi dan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki pola komunikasi organisasi vertikal agar lebih efektif dalam menjalankan program pengelolaan sampah.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan penyampaian kebijakan, koordinasi internal, serta pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.